

ABSTRAK

PELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUNAN KEPADA KORBAN SEBAGAI FAKTOR PERINGAN HUKUMAN DALAM PERKARA LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN ORANG (Studi Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2022/PN Tjk Dan Studi Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2022/PN Tjk)

**Oleh
IZZHA DZAKY ABDILLAH**

Kasus lalu lintas diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa kelalaian seorang pengemudi dapat berakibat fatal, hingga mengakibatkan kematian. Umumnya, penyelesaian kasus semacam ini dilakukan melalui proses perdamaian antara pihak pelaku dan keluarga korban. Dalam kesepakatan ini, kedua belah pihak berkomitmen untuk menanggung semua biaya yang timbul akibat pelanggaran lalu lintas, yang berupa pembayaran ganti rugi. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai bagaimanakah pelaksanaan pemberian santunan terhadap korban kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang dan dasar pertimbangan hakim terhadap pembayaran santunan yang dapat meringankan hukuman bagi pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang dalam Putusan Nomor: 989/Pid.Sus/2022/ PN.Tjk dan Putusan Nomor: 953/Pid.Sus/2022/ PN.Tjk. Banyaknya fenomena kelalaian lalu lintas namun pihak keluarga korban tidak mau melakukan perdamaian sehingga hal ini dapat memberatkan hukuman pelaku kelalaian lalu lintas yang menyebabkan kematian korban, sehingga penelitian yang diambil dalam Putusan Nomor: 989/Pid.Sus/2022/ PN.Tjk dan Putusan Nomor: 953/Pid.Sus/2022/ PN.Tjk yang mana dalam kedua putusan tersebut pelaku dan keluarga korban sepakat untuk berdamai dan mengganti seluruh kerugian yang diderita sehingga dapat meringankan hukuman yang akan diterima pelaku. Membandingkan kedua putusan atas hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dilihat dari proses pelaksanaan santunan, serta permasalahan disparitas dalam kedua putusan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan seleksi data, klasifikasi data dan penyusunan data. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa proses perdamaian yang dibuktikan dengan surat perdamaian yang berisi pelaksanaan pembayaran santunan oleh pelaku terhadap keluarga korban. Perdamaian yang disertai dengan pembayaran santunan oleh pelaku terhadap korban menunjukkan bahwa ada penyesalan pelaku atas kelalaian yang dilakukan dalam mengendarai kendaraan roda dua maupun roda empat, dan dalam kasus ini tidak dapat dimintakan untuk dilakukan keadilan restoratif karena tidak terpenuhinya unsur keadilan restoratif, jika ada kasus kelalaian yang menyebabkan kematian orang yang diselesaikan dengan keadilan restoratif maka hal tersebut adalah diskresi aparat penegak hukum. Proses Perdamaian yang dilakukan kedua belah pihak tidak menghapuskan unsur pidana, tetapi hanya bersifat meringankan pidana, sehingga pelaksanaan pembayaran santunan menjadi bukti dan dasar hakim dalam mempertimbangan hukuman ringan terhadap putusan pidana bagi pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan kematian korban, dalam kasus tersebut hakim mempertimbangkan unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis yaitu hakim melihat bahwa perbuatan terdakwa dilakukan karena kelalaiannya dalam mengendarai kendaraan roda dua maupun roda empat dan bukan merupakan unsur kesengajaan, dan bukti tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 183 KUHP yang mengatur tentang adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, serta prinsip pembuktian di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Alat bukti tersebut meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan dari terdakwa. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia telah didasarkan pada alat bukti dan fakta-fakta di persidangan. Terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana lalu lintas yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan perbuatan tersebut terjadi akibat kelalaiannya. Disparitas dalam kedua putusan tersebut, hakim selalu melihat faktor-faktor yang dapat dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan yaitu a. faktor intern; b. faktor pada undang-undang itu sendiri; c. faktor penafsiran; d. faktor politik; dan e. faktor social.

Saran yang dihasilkan dari penelitian ini menekankan pentingnya peran hakim sebagai aparat penegak hukum untuk lebih teliti dan hati-hati dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Selain itu, hakim diharapkan selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menentukan sanksi yang tepat bagi pelanggar lalu lintas yang lalai. Di sisi lain, pengemudi perlu lebih berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan terhadap kendaraan yang mereka gunakan. Selalu fokus saat mengemudikan kendaraan juga sangat penting agar dapat meminimalkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

Kata Kunci: Pembayaran Santunan, Peringan Hukuman, Tindak Pidana Lalu Lintas

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF PROVIDING COMPENSATION TO VICTIMS AS MITIGATING FACTORS IN TRAFFIC CASES THAT CAUSE DEATH

(Study of Decision Number 989/Pid.Sus/2022/PN Tjk and Study of Decision Number 953/Pid.Sus/2022/PN Tjk)

**By
IZZHA DZAKY ABDILLAH**

Traffic cases are regulated in Article 310 paragraph (4) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. In the article, it is explained that the negligence of a driver can be fatal, resulting in death. Generally, the settlement of this kind of case is carried out through a peace process between the perpetrator and the victim's family. In this agreement, both parties commit to bear all costs incurred as a result of traffic violations, which is in the form of compensation payments. The problem in this study is how to implement the provision of compensation to victims of traffic negligence that results in the death of people and the basis for the judge's consideration of the payment of compensation that can reduce the sentence for the perpetrators of traffic crimes that result in the death of people in Decision Number: 989/Pid.Sus/2022/ PN.Tjk and Decision Number: 953/Pid.Sus/2022/ PN.Tjk. There are many phenomena of traffic negligence but the victim's family does not want to do peace so that this can burden the punishment of the perpetrator of traffic negligence that caused the victim's death, so that the research taken in Decision Number: 989/Pid.Sus/2022/ PN.Tjk and Decision Number: 953/Pid.Sus/2022/ PN.Tjk where in the two decisions the perpetrator and the victim's family agreed to reconcile and compensate for all losses suffered so that it can alleviate the punishment that the perpetrator will receive. Comparing the two rulings on the punishment handed down by the judge is seen from the process of implementing compensation, as well as the problem of disparity in the two rulings.

This study uses normative and empirical juridical approaches. Data collection was carried out by literature study procedures and field studies. Data processing is carried out by the stages of data selection, data classification and data preparation. Data analysis was carried out qualitatively.

The results of the research and discussion in this study show that the peace process is evidenced by a peace letter containing the implementation of compensation payments by the perpetrator to the victim's family. Peace accompanied by the payment of compensation by the perpetrator to the victim shows that there is remorse of the perpetrator for the negligence committed in driving a two-wheeled or four-wheeled vehicle, and in this case it cannot be requested for restorative justice to be carried out because the element of restorative justice is not fulfilled, if there is a case of negligence that causes the death of a person that is resolved with restorative justice, then it is the discretion of law enforcement officials. The peace process carried out by both parties does not abolish the criminal element, but only mitigates the crime, so that the implementation of compensation payments is evidence and the basis for the judge in considering a light sentence for a criminal conviction for the perpetrator of a traffic crime that resulted in the death of the victim, in that case the judge considers the juridical, sociological, and philosophical elements, namely the judge sees that the defendant's actions were committed because of his negligence in driving a two-wheeled or four-wheeled vehicle and is not an element of intentionality, and the evidence can be used as a consideration by the judge in deciding the case. The judge in this case also considered the provisions of Article 183 of the Criminal Code which regulates the existence of at least two valid evidence, as well as the principle of proof at trial as stipulated in Article 184 of the Criminal Code. The evidence includes witness statements, expert statements, letters, instructions, and statements from the defendant. The verdict handed down by the judge against the perpetrators of traffic crimes that resulted in the death of a person has been based on evidence and facts at the trial. It is legally and convincingly proven that the actions taken by the defendant are traffic crimes charged by the Public Prosecutor, and the act occurred as a result of his negligence. The disparity in the two decisions, the judge always looks at factors that can be used as a basis in making a decision, namely a. internal factors; b. factors in the law itself; c. interpretive factors; d. political factors; and e. social factors.

The suggestions resulting from this study emphasize the importance of the role of judges as law enforcement officials to be more thorough and careful in sentencing traffic violators who cause the loss of other people's lives. In addition, judges are expected to always comply with applicable laws and regulations in determining the appropriate sanctions for negligent traffic violators. On the other hand, drivers need to be more careful and increase their awareness of the vehicles they are using. Always focusing when driving a vehicle is also very important in order to minimize the risk of traffic accidents that can endanger yourself and others.

Keywords: Compensation Payment, Mitigation, Traffic Crimes